



## Efektivitas *Mandatory Spending Tagging* Pendidikan terhadap Pembangunan SDM di Kalimantan Barat

Ibnu Haikal<sup>1\*</sup>, Leily Febi Rahmadianti<sup>2</sup>  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia<sup>1,2</sup>  
Ibnuhkl15@gmail.com<sup>1\*</sup>, leilyfebi@gmail.com<sup>2</sup>

\*corresponding author

**Keywords:** *Mandatory Spending, Personnel Expenditure, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditure, Net Participation Rates.*

### **ABSTRACT**

*Improving the quality of human resources has become a national development priority, supported by mandatory spending policies in the education sector. In West Kalimantan, education spending tagging is implemented to ensure budget allocation aligns with development goals. However, its effectiveness in enhancing human resource outcomes still requires further evaluation. This study aims to test the effectiveness of mandatory spending on education in West Kalimantan by the year of 2018 - 2022. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using panel data regression of regional expenditure and statistic data from Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance and West Kalimantan Central Bureau of Statistics, such as: Personnel Expenditure, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditure, and Net Participation Rates (APM) for the levels of Senior High School (SMA). The result of this study found that Personnel Expenditure, Goods and Services Expenditure, and Capital Expenditure has no significant effect on APM. This research suggest the West Kalimantan Government to reformulate and evaluate the amount of Capital Expenditure that has been distributed which has a negative correlation on APM.*

**Kata Kunci:** *Mandatory Spending, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Angka Partisipasi Murni.*

### **ABSTRAK (Cambria, Bold, 10 pts)**

Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas pembangunan nasional, yang didukung melalui kebijakan *mandatory spending* di sektor pendidikan. Di Kalimantan Barat, *tagging* belanja pendidikan diterapkan untuk memastikan anggaran sejalan dengan tujuan pembangunan. Namun, efektivitasnya dalam mendorong capaian SDM masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dari belanja fungsi pendidikan di Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan regresi data panel yang

datanya bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap APM. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memformulasikan kembali dan mengevaluasi besaran anggaran Belanja Modal yang telah disalurkan yang mana justru memiliki korelasi negative terhadap APM.

JEL CLASSIFICATION: J38

**How to cite:** Haikal, Ibnu dan Rahmadiani, Feby L. (2025). Efektivitas *Mandatory Spending Tagging* Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(1). p.59-78.

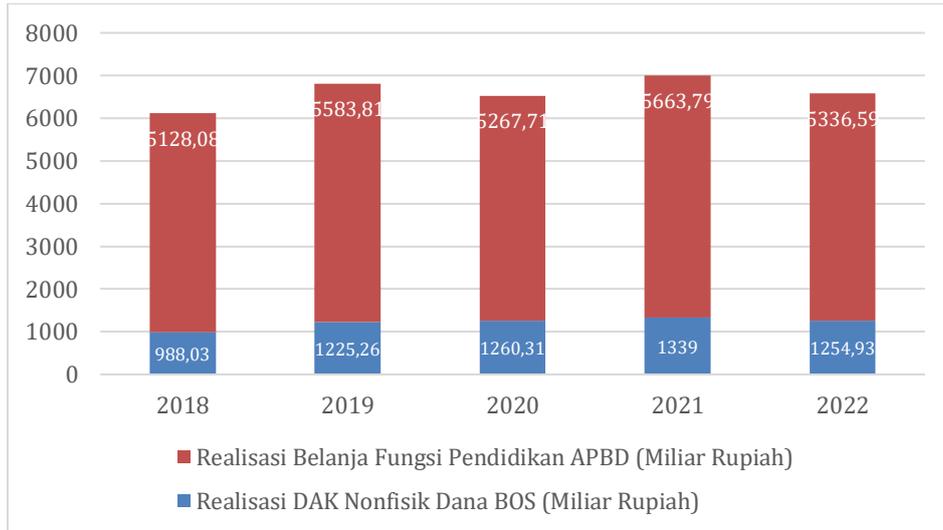
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## PENDAHULUAN

Kemajuan dari suatu negara tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. SDM yang berkualitas memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan suatu negara dari segala aspek khususnya perekonomian (Hasan, et al., 2023). Dengan demikian, pembangunan SDM tentu merupakan tujuan dari setiap negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari komitmen Pemerintah dalam mewujudkan visi menuju Indonesia Emas 2045 yang dituangkan di dalam 8 Agenda Pembangunan RPJPN 2025 – 2045 yakni salah satunya mewujudkan transformasi sosial dengan menciptakan pemerataan fasilitas kesehatan, perlindungan sosial yang adaptif, serta pendidikan berkualitas yang merata. Pendidikan sebagai modal dasar dalam pembangunan SDM sangat berpengaruh pada output ekonomi dan produktivitas suatu negara karena menentukan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan kedepannya (Hasan, et al., 2023).

Dalam mendukung pembangunan SDM, Pemerintah telah menetapkan anggaran khusus bidang pendidikan yang dialokasikan setiap tahunnya dari APBN sebesar 20% dari total belanja negara atau yang dikenal dengan istilah *mandatory spending*. Kebijakan tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) yang menjelaskan bahwa anggaran pendidikan memperoleh prioritas dari negara sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga lebih lanjut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat juga turut serta mengambil peran dalam upaya pembangunan SDM di daerahnya masing-masing. Alokasi belanja pendidikan dalam rangka pembangunan SDM di daerah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Transfer ke Daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan (*Spesific Grant*) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Disisi lain, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan 20% dari APBD-nya untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tahun 2022, realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di semua kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp1.254,93 miliar, sedangkan alokasi belanja pendidikan pada APBD di semua kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai Rp5.336,59 miliar. Dengan demikian, belanja penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh anggaran yang berasal dari APBD. Alokasi belanja pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren yang fluktuatif dan dapat dilihat sebagaimana terjadi pada grafik 1.

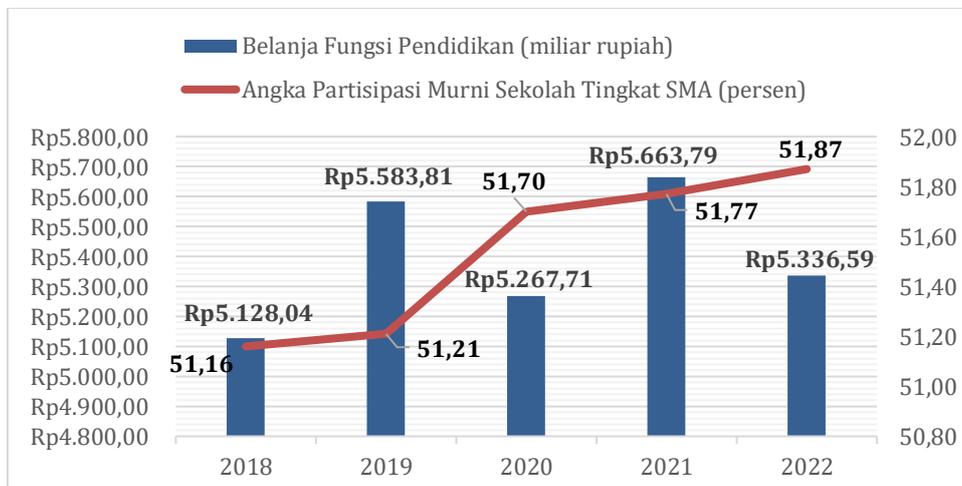
Grafik 1. Tren Belanja DAK Nonfisik Dana BOS dan Belanja Daerah Fungsi Pendidikan Kalimantan Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Portal DJPK Kemenkeu (data diolah peneliti)

Pembangunan SDM yang di-*proxy* dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kalimantan Barat, direpresentasikan oleh APM setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Menurut (Safira & Wibowo, 2021), Angka Partisipasi Murni adalah hasil perbandingan jumlah siswa bersekolah pada suatu tingkat pendidikan terhadap kelompok usia yang seharusnya atau kelompok usia standar pada jenjang masing-masing. Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, disisi lain jumlah realisasi anggaran belanja pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat justru mengalami fluktuasi dari tahun 2018 – 2022 sebagaimana tersaji pada Grafik 2.

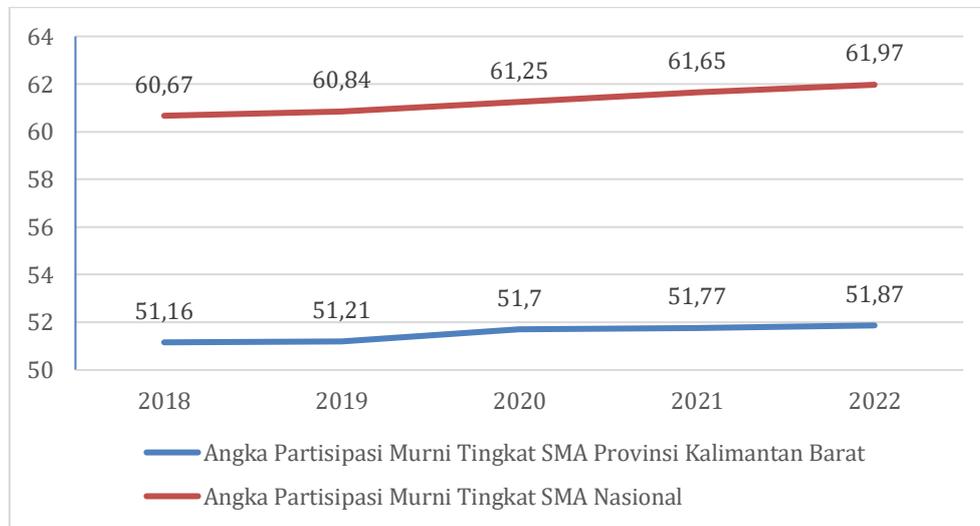
Grafik 2. Perbandingan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dengan Angka Partisipasi Murni Pada Tingkat SMA Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Portal Data DJPK dan BPS Kalimantan Barat (data diolah peneliti)

Jika dibandingkan dengan data secara nasional, nilai APM Provinsi Kalimantan Barat selalu lebih rendah dari rata-rata APM nasional sebagaimana yang tersaji pada Grafik 3. Maka dari itu, tentu sudah menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengejar ketertinggalan APM nasional.

Grafik 3. Perbandingan APM Nasional dan APM Kalimantan Barat Tahun 2018-2022



Sumber: BPS (data diolah peneliti)

Berdasarkan pada penelitian dengan objek penelitian yang serupa oleh (Purnomoratih & Ramadhani, 2023), belanja daerah fungsi pendidikan di Kalimantan Selatan lebih signifikan dibandingkan dengan belanja pusat, tetapi nilainya bersifat kontra produktif terhadap pembangunan IPM. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana efektivitas alokasi anggaran pendidikan dalam memengaruhi pembangunan SDM di daerah lain, seperti Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik fiskal dan sosial ekonomi berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menguji seberapa efektif dan berpengaruhnya setiap rincian belanja fungsi pendidikan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap pembangunan SDM yang di-*proxy*-kan dengan Angka Partisipasi Murni pada tingkat SMA di Provinsi Kalimantan Barat, dan hal tersebut yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran bagi para pembuat kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja pendidikan guna membangun kualitas SDM yang baik di Kalimantan Barat. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian, yakni seberapa efektif setiap rincian belanja pendidikan terhadap pembangunan SDM di Kalimantan Barat.

## **Kajian Pustaka**

### **Belanja Pegawai**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai merujuk pada pengeluaran dalam bentuk kompensasi, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai non-PNS yang diangkat untuk bekerja. Kompensasi ini diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan, selama pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan pembentukan aset atau modal, dan penetapannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai dijabarkan menjadi 2 kategori yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja langsung digunakan untuk menganggarkan honor rutin yang berkaitan dengan kegiatan sedangkan belanja tidak langsung untuk menganggarkan honor rutin yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan (Zebua & Adib, 2014).

### **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau menyediakan barang yang cepat habis pakai serta memiliki masa manfaat paling lama 12 bulan. Selain itu, belanja ini juga mencakup pembayaran atas penggunaan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Umumnya, anggaran ini dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti pembelian perlengkapan kantor, biaya perjalanan dinas pegawai, serta pemeliharaan aset yang dimiliki pemerintah. (Zebua & Adib, 2014). Belanja Barang dan Jasa berasal dari transaksi jual beli barang di pasar secara langsung/tunai, dilanjutkan transaksi pembayaran, dan terakhir dilakukan pembuatan dokumen pertanggungjawaban jual beli atau serah terima (Rohmah, Wisdaningrum, & Ismahyudi, 2022).

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk mendanai aktivitas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab negara. Pengeluaran ini mencakup bidang-bidang yang bersifat wajib demi menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan dasar yang lebih baik. (Amami & Asmara, 2022). Belanja modal ditujukan untuk pengadaan aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pengembangan infrastruktur seperti jalan, irigasi, serta jaringan, serta pengadaan aset tetap dan aset non-tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu indikator produktivitas dari penyerapan anggaran oleh pemerintah. Semakin besar proporsi alokasi belanja modal maka akan semakin menunjukkan bahwa pemerintah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan. (Digdowiseiso, Subiyanto, & Cahyanto, 2022).

### **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara anak yang bersekolah sesuai dengan usia pada jenjang yang seharusnya. Menurut (Eriani & Yolanda, 2022), semakin tinggi APM maka akan semakin banyak juga anak yang bersekolah sesuai dengan

usia resmi/standar untuk setiap jenjang pendidikan. Sejatinya nilai ideal APM ialah 100%, apabila nilai APM lebih dari 100% maka hal tersebut dikarenakan banyak siswa yang berasal dari luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah di daerah tersebut. Hal tersebut kadangkala terjadi di kota besar yang mana siswa dari luar atau pinggiran kota bersekolah di kota besar tersebut.

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada mencari pengaruh antara rincian dari belanja fungsi pendidikan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap pembangunan SDM yang di-*proxy*-kan dengan Angka Partisipasi Murni pada tingkat SMA di Provinsi Kalimantan Barat dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Angka Partisipasi Murni pada tingkat SMA dinilai menjadi objek variabel dependen yang ideal karena peneliti dapat mengetahui berapa persentase anak yang tidak bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan SMA pada umur yang seharusnya karena tingkat SMA merupakan batas minimal pendidikan terakhir agar dapat dipekerjakan oleh sebagian besar perusahaan maupun pemerintah. Dengan demikian, peneliti dapat lebih fokus untuk meneliti apakah terdapat peran serta setiap rincian belanja pendidikan yang digelontorkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan sampai dengan tingkat SMA yang secara simultan juga dapat berpengaruh pada *outcome* berupa pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan SDM yang optimal.

### Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data panel (*balanced panel*) yang merupakan kombinasi antara data *time series* jangka waktu 2018 - 2022 dengan data *cross section* yaitu data belanja pendidikan dari semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat dimana hal tersebut merepresentasikan data belanja pendidikan secara menyeluruh di Kalimantan Barat. Adapun data yang digunakan sebagai variabel independen meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang diambil dari situs resmi Kementerian keuangan-Portal DJPK. Kemudian data yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah Angka Partisipasi Murni pada tingkat SMA yang mem-*proxy* pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Barat dan bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan model analisis data panel dengan bantuan program Eviews 12. Menurut (Sitorus & Yuliana, 2018), enulisan data panel menggunakan dua subskrip, yaitu subskrip *i* untuk individu dan subskrip *t* untuk waktu. Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan model estimasi yang dapat digunakan, yakni model efek umum (*common effect model*), model efek tetap (*fixed effect model*), dan model efek acak (*random effect model*). Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, dengan rumus persamaan regresi sebagai berikut (Madany, Ruliana, & Rais, 2022),

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{oit}$$

Sehingga persamaan liniernya adalah sebagai berikut:

$$APM = \beta_0 + \beta_1BP + \beta_2BJS + \beta_3BM + \mu$$

Dimana,

variabel APM = Angka Partisipasi Murni (%);  
BP = Belanja Pegawai (miliar Rupiah);  
BJS = Belanja Barang dan Jasa (miliar Rupiah);  
BM = Belanja Modal (miliar Rupiah);  
0 = konstanta (*intercept*);  
1, 2, 3, 4 = koefisien regresi; dan  
 $\mu$  = error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Belanja Pegawai (Miliar Rupiah)	Belanja Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)	Belanja Modal (Miliar Rupiah)	Angka Partisipasi Murni (Persentase)
<b>Mean</b>	263,073	66,668	48,049	51,26
<b>Maximum</b>	435,018	152,582	113,487	61,61
<b>Minimum</b>	104,382	18,750	16,354	41,16
<b>Std. Dev.</b>	94,192	29,737	20,584	6,17
<b>Observasi</b>	70	70	70	70

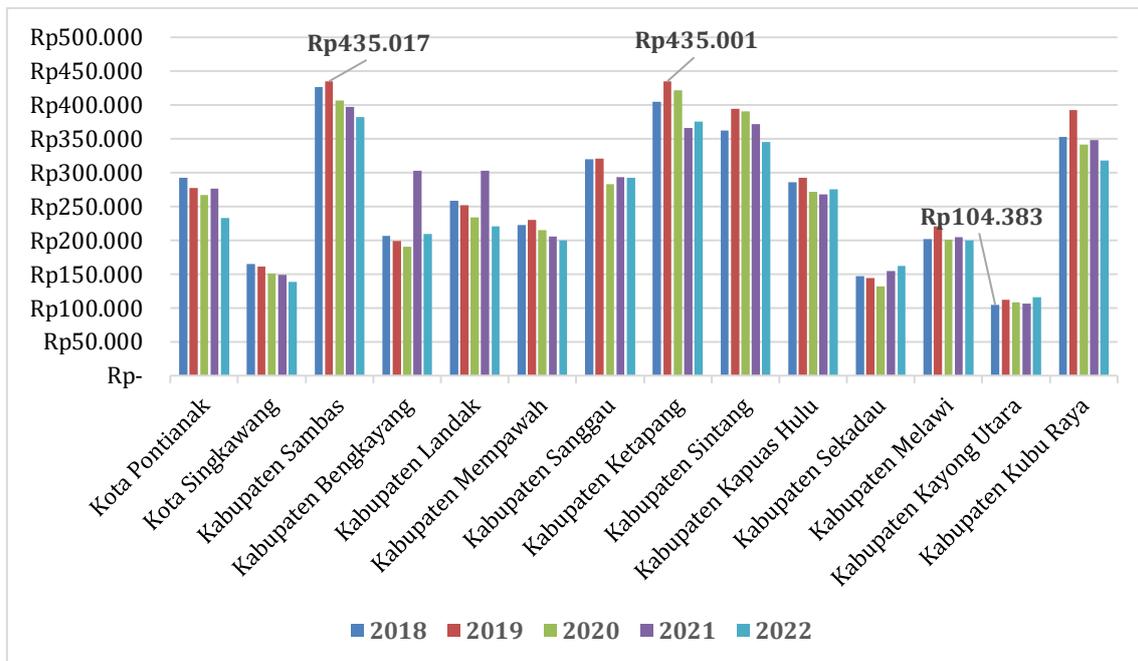
Sumber: Data diolah

Tabel 1. menyajikan statistik deskriptif terkait nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan diolah. Adapun Angka Partisipasi Murni sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebesar 51,26 untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Disisi lain, variabel independen berupa rincian belanja fungsi pendidikan sebagian besar masih didominasi oleh Belanja Pegawai dengan rata-rata 263,07 miliar rupiah yang kemudian diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa dengan rata-rata sebesar 66,66 miliar rupiah serta Belanja Modal sebesar 48,04 miliar rupiah.

#### 1. Belanja Pegawai

Berdasarkan grafik 4, Belanja Pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Sambas yakni sebesar 435,017 miliar rupiah, hanya selisih 17 miliar dibandingkan dengan yang ada di peringkat kedua pada tahun yang sama yaitu Kabupaten ketapang. Hal tersebut dikarenakan jumlah guru di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang menurut survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 adalah yang terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat untuk jenjang SD/MI/SMP/SMA dengan masing-masing berjumlah 5311 dan 5519 pegawai. Sementara belanja pegawai terendah terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Kayong Utara yakni sebesar 104,38 miliar rupiah yang dikarenakan jumlah guru Kabupaten Kayong Utara adalah yang terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yakni hanya berjumlah 1251 pegawai.

Grafik 4. Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



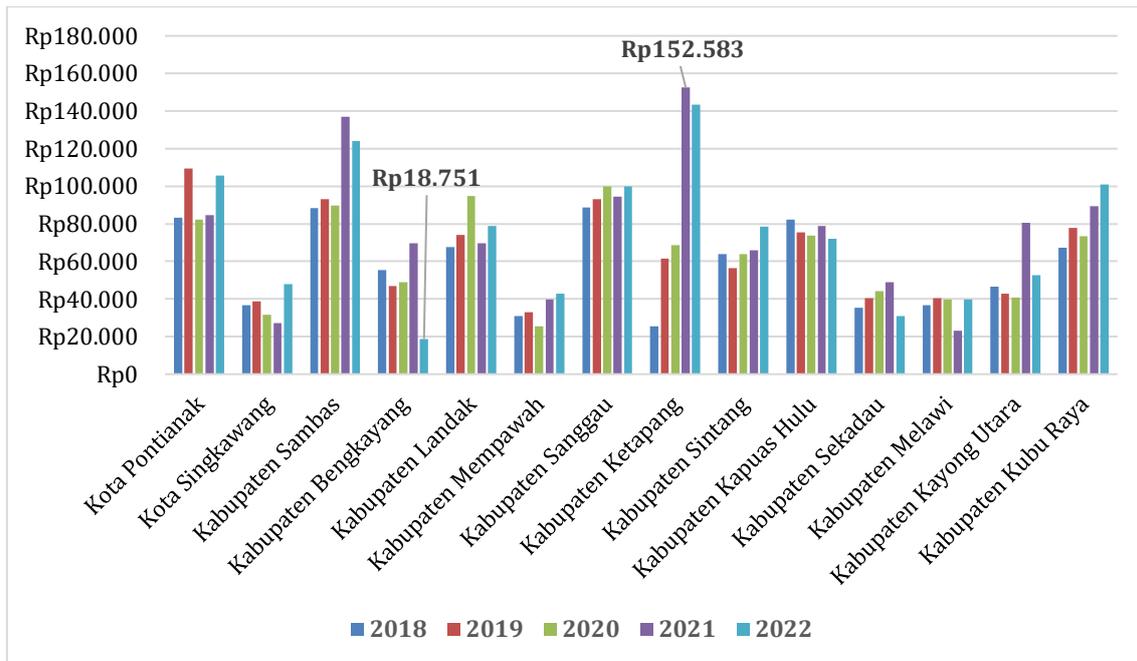
Sumber: Portal DJPK, data diolah

Belanja Pegawai fungsi pendidikan pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, namun mulai tahun 2020 terlihat cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat pemerintah melakukan *refocusing* anggaran dalam hal penanganan pandemi hingga pemulihan ekonomi di tahun berikutnya.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan tentu tidak terlepas dari Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang sangat vital dalam mendukung kegiatan operasional sekolah sehari-hari seperti ATK, pemeliharaan sekolah, sampai dengan penggajian honorer. Sebagaimana yang disajikan pada grafik 5, Belanja Barang dan Jasa untuk keperluan pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Ketapang senilai 152,58 miliar rupiah. Sementara Belanja Barang dan Jasa untuk keperluan pendidikan terendah terjadi pada tahun 2022 di Kabupaten Bengkayang senilai 18,75 miliar rupiah.

Grafik 5. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

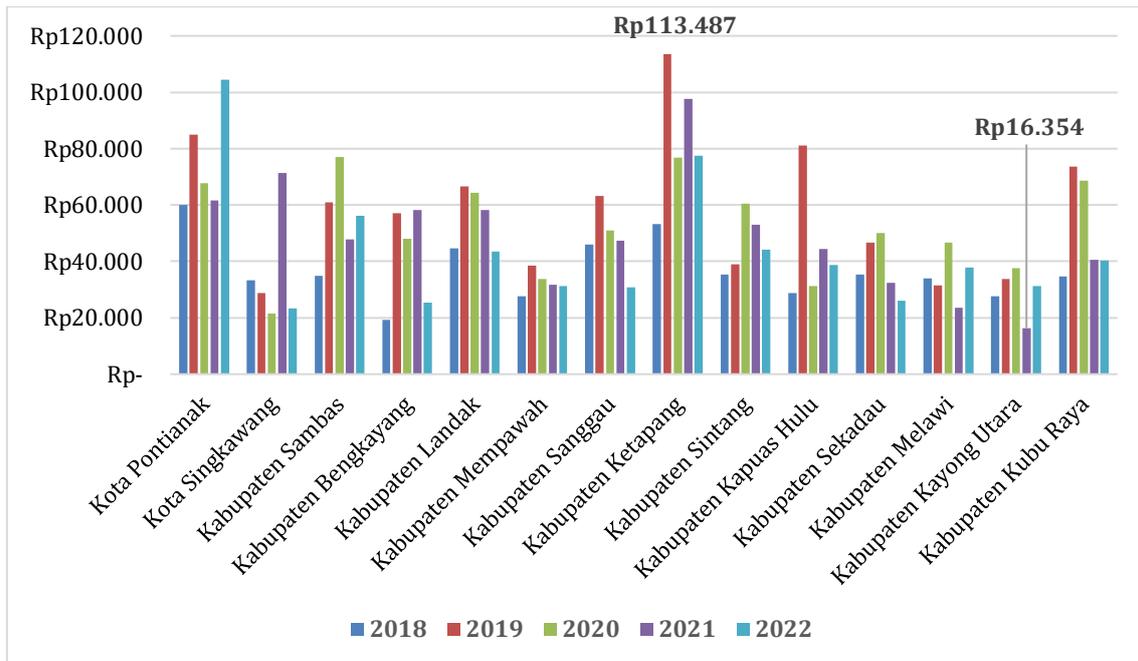


Sumber: Portal DJPK, data diolah

### 3. Belanja Modal

Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan yang dicerminkan oleh ketersediaan fasilitas khususnya bangunan sekolah (Sitorus & Yuliana, 2018). Adapun Belanja Modal Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tertinggi sebagaimana yang tersaji pada grafik 6 terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Ketapang dengan belanja sebesar 113,48 miliar rupiah. Jumlah sekolah pada tingkat SD/SMP/SMA/SMK yang ada di Kabupaten Ketapang berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat adalah yang terbanyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yakni sejumlah 704 sekolah. Disisi lain, Belanja Modal Pendidikan terendah terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Kayong Utara sebesar 16,35 miliar rupiah karena memiliki jumlah sekolah paling sedikit dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yakni hanya sejumlah 157 sekolah.

Grafik 6. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Portal DJPK, data diolah

### Pemilihan Model Terbaik dalam Regresi Data Panel

Dalam melakukan pengujian regresi terhadap data panel, maka pemilihan model terbaik dilakukan dengan pemilihan tiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga model tersebut, berikutnya harus dilakukan pemilihan model yang paling tepat dan sesuai dengan data yang ada. Untuk itu, dalam menentukan model estimasi yang tepat, maka perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan, dan Uji Hausman.

#### 1. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih model terbaik antara dua model yakni antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Chow juga digunakan untuk memastikan bahwa teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM) (Sitorus & Yuliana, 2018). Uji Chow dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Common Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Tabel 2. Uji Chow.

Variabel	Koefisien	Standar Error	t. Statistik	Prob.
_cons	54,88493	2,173411	25,25290	0,0000
BP	-0,036246	0,009372	-3,867389	0,0003
BJS	0,035461	0,029763	1,191437	0,2377
BM	0,073745	0,040544	1,818873	0,0735
<b>R-squared</b>	<b>0,190048</b>			
<b>Prob &gt; F</b>	<b>0,002886</b>			

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil Uji Chow yang telah dilakukan sebagaimana yang tersaji di tabel 2. Menunjukkan bahwa nilai *probability cross section F-test* adalah sebesar 0,002886. Maka, nilai *F-test* signifikan dimana lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisiensi signifikansi  $\alpha$  yang bernilai 0,05. Oleh karena itu, hasil uji Chow yang diambil adalah tolak  $H_0$  sehingga penggunaan model pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) adalah dengan melakukan Uji Hausmann (*Hausmann Test*).

2. Uji Hausmann

Metode uji ini dilakukan untuk memilih estimasi model terbaik di antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hausman

Variabel	(b) FEM	(B) REM	(b-B) Difference	Prob.
BP	-0,020635	-0,021287	0,000001	0.4055
BJS	0,016165	0,016995	0,000001	0.4746
BM	0,024172	0,026088	0,000004	0.3461
<b>Prob &gt; F</b>	<b>0,5158</b>			

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Hipotesis:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Dari hasil Uji Hausman, diketahui bahwa nilai *probability F* sebesar 0,5158 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisiensi signifikansi  $\alpha$  yang bernilai 0,05. Oleh karena itu,  $H_0$  diterima sehingga model yang terpilih adalah pendekatan *Random Effect Model* (REM). Setelah dilakukan pengujian pemilihan model terbaik dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Untuk memastikan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah model terbaik, maka terakhir akan dilakukan pengujian Kembali antara *Random Effect Model* (REM) dengan *Common Effect Model* (CEM) melalui Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (LM).

3. Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (LM)

Setelah dilakukan Uji Hausmann dan didapati bahwa model terbaik adalah model *Random Effect Model* (REM) dibandingkan model *Fixed Effect Model* (FEM). Maka lebih lanjut dilakukan pengujian model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) terhadap *Common Effect Model* (CEM). Uji LM dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Common Effect Model*

$H_1$ : *Random Effect Model*

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t. Statistik	Prob.
_cons	54,88493	2,173411	25,25290	0,0000
BP	-0,036246	0,009372	-3,867389	0,0003
BJS	0,035461	0,029763	1,191437	0,2377
BM	0,073745	0,040544	1,818873	0,0735
<b>R-squared</b>	<b>0,190048</b>			
<b>Prob &gt; F</b>	<b>0,002886</b>			

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-Section	Time Series	Both.
Breusch-Pagan	103,5631 (0,0000)	1,997367 (0,1576)	105,5605 (0,0000)
Honda	10,17660 (0,0000)	-1,413283 (0,9212)	6,196599 (0,0000)
King-Wu	10,17660 (0,0000)	-1,413283 (0,9212)	4,529605 (0,0000)
Std. Honda	11,21726 (0,0000)	-1,233412 (0,8913)	3,930984 (0,0000)
Std. King Wu	11,21726 (0,0000)	-1,233412 (0,8913)	3,930984 (0,0000)
Gourieroux, et al.	-	-	103,5631 (0,0000)

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Setelah dilakukan pengujian, didapati bahwa nilai *cross-section* Breusch-Pagan sebesar 0,0000 serta *probability F* sebesar 0,002886 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai koefisiensi signifikansi  $\alpha$  yang bernilai 0,05. Maka hasil uji LM yang diambil adalah tolak  $H_0$  sehingga model yang terpilih adalah pendekatan *Random Effect Model* (REM). Dengan demikian, dalam pengujian regresi serta uji asumsi klasik akan menggunakan *Random Effect Model* (REM).

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan linier di antar variabel independen dalam suatu model regresi. Salah satu asumsi utama dalam analisis regresi adalah tidak adanya multikolinearitas di antara variabel prediktor. Asumsi ini dianggap terpenuhi apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada di bawah angka 10 dan nilai toleransi melebihi 0,1, yang mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	<b>BP</b>	<b>BJS</b>	<b>BM</b>
<b>BP</b>	1,000000	0,583992	0,508787
<b>BJS</b>	0,583992	1,000000	0,505328
<b>BM</b>	0,508787	0,512509	1,000000

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapatkan hasil bahwa seluruh nilai dari variabel independen berada di bawah 0,85 (Napitupulu, et al., 2021). Kemudian, nilai toleransi seluruh Variabel juga berada di atas 0.1. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinearitas sehingga memenuhi kaidah pengujian asumsi klasik.

### 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan antara *variance* dan residual model regresi. Asumsi klasik terpenuhi apabila tidak bersifat heteroskedastisitas atau yang disebut dengan homoskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t. Statistik</b>	<b>Prob.</b>
_cons	6,772106	1,278182	5,298234	0,0000
BP	-0,014619	0,004166	-3,509246	0,0008
BJS	0,017581	0,011743	1,497082	0,1391
BM	0,012889	0,016436	-0,784186	0,4357

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

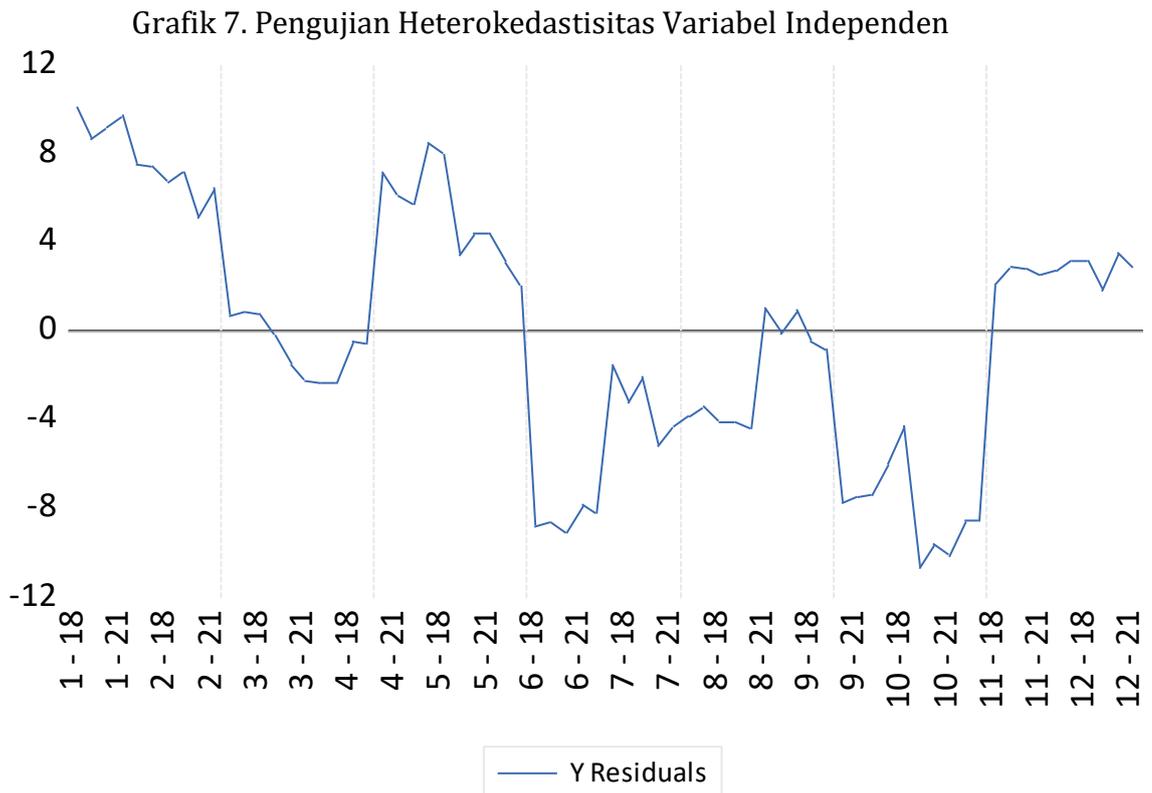
Hipotesis:

H0 = Residu bersifat homoskedastis

H1 = Residu bersifat heteroskedastis

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F lebih besar daripada nilai koefisiensi signifikansi  $\alpha$  yang bernilai 0,05. Hal ini berarti bahwa residu bersifat homoskedastis (tidak tolak H0) sehingga asumsi klasik terpenuhi untuk variabel Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, namun tidak untuk Belanja Pegawai. Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian kembali grafik residual pada ketiga variabel untuk memastikan lolos uji asumsi klasik heterokedastis.

Adapun pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik residual sebagai berikut.



Sumber: EViews 12, yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa rentang grafik uji heteroskedastisitas masih berada di dalam kisaran -500 sampai dengan 500, sehingga disimpulkan data bersifat homoskedastis dan lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu, et al., 2021).

#### Hasil Regresi Data Panel

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Adapun hasil regresinya sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t. Statistik	Prob.
_cons	54,54776	2,096926	26,01320	0,0000
BP	-0,021287	0,005048	-4,217066	0,0001
BJS	0,016995	0,013917	1,221191	0,2264
BM	0,026088	0,019575	1,332676	0,1872
<b>R-squared</b>	<b>0,216924</b>			
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0,181330</b>			
<b>Prob &gt; chi2</b>	<b>0,001004</b>			
<b>F-Statistic</b>	<b>6,094339</b>			

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Dari hasil regresi menggunakan metode terpilih yakni *Random Effect Model* (REM) seperti pada tabel 4, maka didapati persamaan model tersebut sebagai berikut.

$$\text{APM} = 54.8849312933 - 0.0362456747941 \cdot \text{BP} + 0.0354605390233 \cdot \text{BJS} + 0.0737450697535 \cdot \text{BM}$$

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Analisis Koefisien Determinasi

Nilai  $R^2$  dari hasil regresi data panel menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) dari variabel dependen dan variabel independen adalah sebesar 0,181330 dengan interpretasi bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 18,1330%, sedangkan sisanya yakni sebesar 81,867% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 2. Uji Signifikansi secara Parsial

Uji signifikansi parsial (uji t) bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, yang dalam konteks ini mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pengujian ini dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

- Apabila nilai signifikansi pada uji t melebihi 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji t berada di bawah 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Uji Signifikansi Parsial

Variabel	P >  z	Signifikansi
BP	0,0001	Berpengaruh Signifikan
BJS	0,2264	Tidak Berpengaruh Signifikan
BM	0,1872	Tidak Berpengaruh Signifikan

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Setelah dilakukan Uji t terhadap data panel, didapati bahwa Belanja Pegawai berpengaruh signifikan sementara Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap APM.

### 3. Uji Signifikansi secara Simultan

Pengujian signifikansi simultan atau Uji F bertujuan untuk menilai sejauh mana seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada:

- Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel-variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga mengindikasikan bahwa secara kolektif, variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Uji Signifikansi Simultan

Nilai Prob (F-statistic)	Signifikansi
0,001004	Berpengaruh Signifikan

Sumber: EVIEWS 12, yang diolah oleh penulis

Setelah dilakukan Uji Signifikansi Simultan (Uji F), didapati bahwa nilai P-Value sebesar 0,001004 sehingga nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan signifikan F yakni 0,05. Dengan kata lain, variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### Pembahasan

Di Provinsi Kalimantan Barat, belanja fungsi pendidikan masih didominasi oleh belanja pegawai yang sifatnya administratif yakni untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru daerah. Menurut (Purnomoratih & Ramadhani, 2023) dalam penelitiannya di Provinsi Kalimantan Selatan, belanja pegawai khususnya sertifikasi guru daerah dinilai belum optimal karena guru cenderung lebih memprioritaskan dirinya pribadi dibandingkan dengan meningkatkan kualitas serta potensi diri. Sama halnya dengan belanja barang dan jasa yang dinilai kurang efektif dalam peningkatan APM karena realisasi belanja barang dan jasa cenderung dilakukan percepatan dan realisasi sepenuhnya saat mendekati akhir tahun anggaran sehingga berpotensi terjadinya *idle cash* pada awal dan pertengahan tahun berjalan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di atas

yang mana dihasilkan adanya pengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara signifikannya suatu rincian belanja fungsi pendidikan terhadap peningkatan APM di Provinsi Kalimantan Barat.

Efektivitas belanja fungsi pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang begitu kompleks, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa beberapa belanja memang dilihat tidak efektif pada peningkatan APM. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM). Artinya, semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk Belanja Pegawai menyebabkan semakin rendah indeks APM. Sebaliknya, penurunan Belanja Pegawai justru akan meningkatkan APM karena variabel tersebut berkorelasi negatif. Artinya, penurunan Belanja Pegawai dapat dilakukan dengan cara menekan proporsi alokasi belanja pegawai melalui penerapan kebijakan *minus growth* atau menunda penerimaan pegawai baru serta diiringi dengan reformulasi kebutuhan anggaran untuk merealokasikan anggaran tersebut pada komponen belanja lain seperti Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, ataupun Belanja Lainnya seperti Bansos dan Subsidi. Kemudian belanja pegawai hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan administratif dan kesejahteraan pegawai, yang tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan partisipasi pendidikan. Menurut (Saputra & Khoirunurrofik, 2022), menyebutkan bahwa Belanja Pegawai dapat berpengaruh negatif terhadap belanja pendidikan karena disebabkan oleh pengalokasian dana yang terlalu besar untuk belanja pegawai dapat mengurangi alokasi untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau penyediaan bantuan langsung kepada siswa.

Untuk variabel Belanja Barang dan Jasa memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM). Artinya, semakin besar Belanja Barang dan Jasa pemerintah, seperti pengadaan peralatan pendidikan, bahan ajar, dan dukungan logistik lainnya, menyebabkan semakin tinggi APM. Meskipun demikian, pengaruh positif tersebut tidak signifikan karena disinyalir belum optimalnya alokasi belanja ini. Menurut (Sunandar & Nurkolis, 2012) menyebutkan bahwa barang dan jasa, khususnya untuk bidang pendidikan, harus dikelola dengan efisien karena sumber daya yang terbatas. Apabila kualitas perencanaan barang dan jasa yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan dalam implementasinya tidak maksimal, maka *outcome* yang diharapkan sulit untuk dicapai.

Belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM), yang artinya semakin tinggi belanja modal, maka secara tidak signifikan justru meningkatkan indeks APM. Ketika pemerintah melakukan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur ataupun pengadaan peralatan dan mesin dalam mendukung pembelajaran di sekolah, maka *output* yang diperoleh belum terlalu berpengaruh terhadap apa yang direncanakan yaitu berdampak positif pada kualitas pendidikan karena penyediaan akses pendidikan lebih baik. Padahal, infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya tampung sekolah, kenyamanan belajar, serta motivasi siswa dan orangtua untuk melanjutkan pendidikan sehingga pada akhirnya akan menunjang peningkatan APM (Safira & Wibowo, 2021).

Setiap rincian belanja belanja fungsi pendidikan memiliki pengaruhnya masing-masing terhadap peningkatan APM di Provinsi Kalimantan Barat, sekalipun setiap rincian belanja tersebut diberikan proporsi yang sama di dalam APBD, didapati ketiga rincian belanja tersebut justru memberikan pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap peningkatan indeks APM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis sebelumnya, disimpulkan bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APM. Disisi lain, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan APM. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan Belanja Pegawai justru secara signifikan menurunkan indeks APM di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perlu dievaluasi kembali terkait alokasi Belanja Pegawai yang terlalu tinggi agar dapat ditekan dengan menetapkan kebijakan *minus growth* dan mereformulasi rencana anggaran dengan mengalokasikan ke komponen belanja pendidikan lain. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga tetap harus tetap mengoptimalkan alokasi Belanja Barang dan Jasa walau secara tidak signifikan namun memiliki koefisien paling besar pada peningkatan indeks APM dengan menunjang fasilitas baik berupa pemeliharaan gedung bangunan maupun atribut peralatan persediaan sekolah dan lainnya dalam meningkatkan prestasi dan minat siswa untuk bersekolah serta diharapkan dapat lebih mengoptimalkan Belanja Barang dan Jasa di periode penting seperti saat tahun ajaran baru atau semester baru agar siswa mendapatkan fasilitas pembelajaran yang layak. Begitu juga dengan alokasi Belanja Modal, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat mengevaluasi kembali Belanja Modal agar dapat lebih efektif dan tepat sasaran terutama dalam meningkatkan taraf pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat karena memiliki pengaruh positif walau tidak signifikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjabarkan lebih rinci kebermanfaatan dan *output* dari belanja pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka penelitian ini hanya memiliki sudut pandang 1 arah yakni sudut pandang dari peneliti tanpa mempertimbangkan adanya faktor lain yang memengaruhi di luar variabel penelitian ini. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu melakukan penelitian dengan melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat baik itu melalui survei ataupun wawancara kepada pihak terkait mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja fungsi pendidikan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan BM terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 48-58.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2572-2580.
- Eriani, E., & Yolanda, A. M. (2022). Analisis Angka Partisipasi PAUD Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Provinsi Riau. *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 1-16.
- Hasan, M., Sofyan, Rahmah, N., Elpisah, Sulistyowati, R., Ratnah, . . . Handayani, A. A. (2023). *PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA: MENGGAGAS PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK MODAL MANUSIA*. Makassar: Tahta Media Group.
- Madany, N., Ruliana, R., & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan IDX LQ45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 79-94.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Mulia Sirait, R. T., & Lumban Tobing, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Medan: Madenatera.
- Purnomoratih, Y., & Ramadhani, N. S. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 121.
- Rohmah, N., Wisdaningrum, O., & Ismahyudi, M. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan Serta Belanja Barang dan Jasa terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Desa. *Al-Muhasib: Journal of Accounting and Finance*, 88-108.
- Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni sebagai Indikator Keberhasilan Pendidikan Indonesia. *PAKAR Pendidikan*, 104.
- Saputra, A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah? Studi Kasus Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 267-273.
- Sitorus, Y. M., & Yuliana, L. (2018). Penerapan Regresi Data Panel pada Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi Provinsi-Provinsi di Luar Jawa Tahun 2010-2014. *Media Statistika*, 5-6.
- Sunandar, & Nurkolis. (2012). Efisienkah Belanja Pendidikan Kabupaten. *Jurnal Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang*, 95-104.
- Zebua, F. F., & Adib, N. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2011 - 2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5.